

BAB I

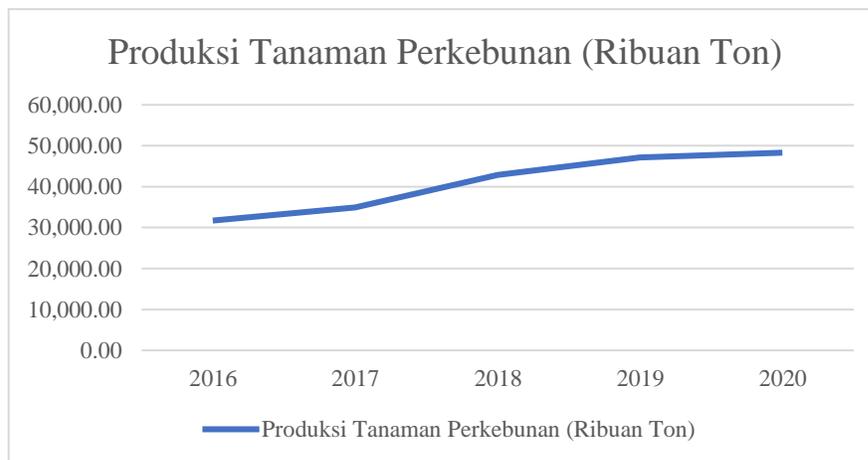
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan upaya Indonesia dalam mempertahankan pasar minyak sawit di India secara berkelanjutan pada tahun 2017-2021. Indonesia telah dinobatkan sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia sejak tahun 2006 yang sebelumnya diduduki oleh Malaysia. Tercatat selama kurun waktu 2014-2018 rata-rata produksi minyak sawit Indonesia naik hingga 53,94% dari produksi minyak sawit dunia, sedangkan rata-rata produksi minyak sawit Malaysia hanya menyentuh angka 30,42% dari produksi minyak sawit dunia, dimana rata-rata produksi minyak sawit dunia adalah sebesar 63,82 juta ton (Novindra et al., 2021). Selain itu, Indonesia juga merupakan negara pengekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia sejak tahun 2008, yang sebelumnya dipimpin oleh Malaysia. Periode 2014-2018, diketahui rata-rata ekspor CPO dunia sebesar 14,86 juta ton. Rata-rata ekspor CPO Indonesia ke dunia sebesar 6,49 juta ton (pangsa 43,65%) sedangkan rata-rata ekspor CPO Malaysia ke dunia sebesar 4,01 juta ton (UN Comtrade, 2019). Hal ini juga menunjukkan bagaimana potensi dari pasar CPO Indonesia terhadap dunia memiliki peluang yang cukup besar jika ditinjau melalui segmentasi kepemilikan pasar dunia jika dibandingkan dengan negara-negara penghasil CPO lainnya.

Perkembangan volume produksi minyak sawit Indonesia yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana hal ini juga sangat mempengaruhi potensi ekspor yang perlu didayagunakan sehingga menjadi keunggulan bersaing. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik mengenai produksi tanaman perkebunan dari tahun 2016-2020, dapat dilihat bahwasanya ekspor CPO Indonesia kepada segmentasi pasar dunia mengalami peningkatan secara konsisten (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal tersebut dapat dilihat dari chart dibawah ini.

Grafik 1.1 Produksi Tanaman Perkebunan (Ribuan Ton)



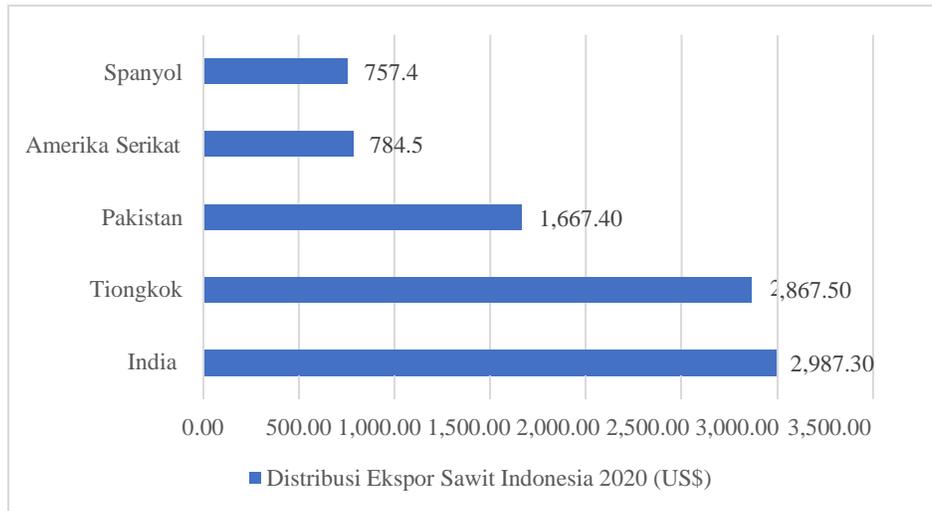
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwasannya dalam kurun waktu lima tahun, Indonesia mengalami peningkatan ekspor CPO terhadap segmentasi pasar dunia secara konsisten dan terus selalu tumbuh setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Sehingga hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai pasar perdagangan CPO internasional, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia. Oleh karena itu, perdagangan CPO dalam skala internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga berdampak positif kepada pemasukan negara. Salah satunya melalui peningkatan pendapatan devisa negara, dimana surplus terjadi salah satunya diakibatkan oleh penjualan CPO dalam skala internasional. Menurut data yang dirilis oleh GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), ekspor CPO menyumbang sebesar USD 23 miliar atau setara Rp 300 triliun terhadap devisa negara jika dibandingkan dengan komoditas lainnya (GAPKI, 2017b). Artinya, secara ekonomi sumbangan devisa melalui ekspor CPO menambah aliran ekonomi dalam perekonomian nasional.

Dengan adanya kontribusi ekspor minyak sawit tersebut Indonesia telah mampu menjadi penyumbang devisa negara dan membuat surplus perdagangan hingga menuntaskan kemiskinan (Ubaidillah, 2021). Lebih jauh lagi, pasar ekspor sawit Indonesia menurut data (Badan Pusat Statistik, 2022) yang menduduki posisi tertinggi pada lima negara yaitu India,

Tiongkok, Pakistan, Amerika Serikat, Spanyol. Lima negara tersebut merupakan negara dengan permintaan sawit mentah tertinggi, khususnya India.

Grafik 1.2 Distribusi Ekspor Sawit Indonesia 2020 (US\$)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Data-data tersebut menunjukkan bahwasannya dari lima negara yang menduduki permintaan tertinggi atas impor CPO dari Indonesia, bahwa India menduduki urutan pertama dengan jumlah permintaan paling banyak dari keempat negara lainnya. Impor minyak kelapa sawit dari Indonesia digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan India dalam bidang industrial, konsumsi tersebut bisa mencapai 5,5 juta ton. Maka dari itu, terdapat ketergantungan yang berlebih akan permintaan impor CPO dari Indonesia menuju India yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari India dalam mengelola olahan CPO yang diperoleh dari Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India mengalami lonjakan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2016-2018, jumlah ekspor CPO Indonesia ke India mengalami fluktuasi. Ketika India menetapkan penurunan pajak impor CPO dari sebesar 12,5% tahun 2016 menjadi 7,5% tahun 2017, ini menyebabkan jumlah ekspor CPO Indonesia meningkat. Sebaliknya Ketika India menaikkan pajak impor CPO-nya menjadi 44% pada tahun 2018 menyebabkan penurunan jumlah ekspor CPO Indonesia ke India (UN Comtrade, 2019). Hal ini menandakan bahwa pengenaan pajak pada perdagangan internasional juga

berpengaruh terhadap aktivitas permintaan yang terjadi antar negara pada komoditas tertentu (Nugroho & Lubis, 2020).

Dengan besarnya permintaan impor CPO dari Indonesia khususnya terhadap India, maka aktivitas perdagangan komoditas CPO Indonesia terhadap India menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Sebab Indonesia masih bergantung pada perolehan nilai devisa dari ekspor CPO, selain itu Indonesia juga masih mengimpor produk turunan CPO. Karena Indonesia merasa mampu mencapai perkembangan yang sangat pesat berkat perkebunan kelapa sawit yang dapat memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kelapa sawit, ekspor CPO yang menghasilkan devisa dan menyediakan kesempatan kerja, harga CPO dunia yang cukup baik dan stabil, sebagai minyak biofuel pengganti minyak fosil (Bernaz et al., 2019). Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, capaian ekspor Indonesia didominasi oleh produk hasil pengolahan. Pada Mei 2021, sektor industri makanan menjadi penyumbang devisa terbesar dari ekspor industri pengolahan non-migas sebesar USD 3,25 Miliar, kemudian oleh sektor logam dasar sebesar USD 2,34 Miliar, bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar USD 1,49 Miliar, komputer, barang elektronik, dan optik sebesar USD 633,9 juta, serta kertas dan barang dari kertas sebesar USD 580,6 juta. Dilihat dari faktor pembentuknya, nilai ekspor sektor industri makanan didominasi oleh komoditas minyak kelapa sawit yang memberikan kontribusi sebesar 69,13%. Kelapa sawit sendiri banyak digemari pasar global untuk keperluan 6F: *Food* (pangan), *Fuel* (Bahan bakar terbarukan), *Fine Chemical* (sabun dan personal wash), *Fito-nutrient* (vitamin dan nutrisi), *Feed* (pakan ternak), dan *Fiber* (serat untuk material baru) (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021).

Ekspor dan impor merupakan kegiatan utama dari perdagangan internasional, dengan proses pengawasan instansi Bea Cukai. Instansi tersebut bertugas mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor), serta bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun udara. Dalam skala perdagangan komoditi internasional, regulasi yang jelas juga merupakan hal yang penting untuk digunakan, sehingga dapat berjalan untuk mengawasi aktivitas perdagangan yang ada. Jika mengacu dalam pembahasan Bea Keluar (BK), maka terdapat peraturan yang berusaha untuk mengukur nilai kompetitif dari barang dan jasa pada perdagangan internasional. Dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang

1. Revealed Comparative Advantage (RCA) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur daya saing suatu produk dengan mengukur keunggulan atau kelemahan dari suatu barang dan jasa suatu negara.

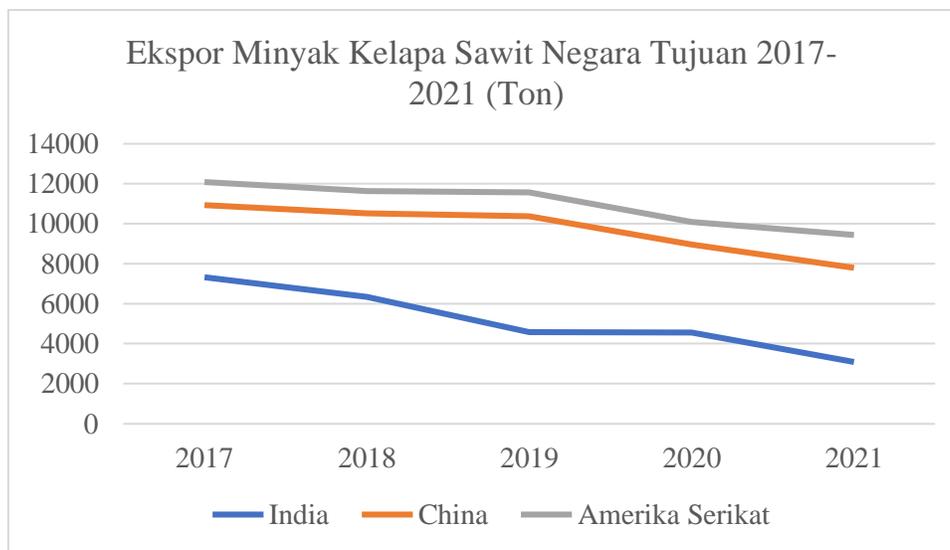
2. Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 2A ayat 19, BK dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk: a.) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; b.) Melindungi kelestarian sumber daya alam; c.) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; d.) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Berdasarkan dengan peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal perdagangan CPO dinilai memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam penurunan dan kenaikan ekspor CPO, dalam hal ini pemberlakuan Bea Keluar CPO dan turunannya oleh pemerintah Indonesia membuat harga CPO Indonesia menjadi naik di pasar dunia. Minyak sawit juga merupakan produk yang mempunyai nilai cukup strategis karena salah satu produk turunan minyak sawit adalah minyak goreng. Untuk mengendalikan ekspor CPO yang akan berlaku secara berlebihan karena permintaan yang terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang berpotensi berujung pada inflasi dalam negeri, maka kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dikenakan Bea Keluar (BK) (Purba & Ardiyanti, 2021). Mengacu pada PMK No. 98/PMK.010/2022, kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya menjadi komoditas yang dikenai bea keluar dan tarif bea keluar (Shaid, 2022). Bea Keluar dilakukan demi menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan ketersediaan produk kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Beleid terkait Bea Keluar CPO dan turunannya dirilis bersamaan dengan adanya program percepatan ekspor CPO beserta produk turunannya sebagai upaya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) pada tingkat perkebunan (Galuh, 2022). Sehingga hal ini akan menjamin pemenuhan kebutuhan di dalam negeri dan melindungi kelestarian sumber daya alam. Kebijakan bea keluar juga dapat diterapkan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kenaikan harga drastis di pasar internasional.

Jika melihat kebelakang, secara historis pasar CPO Indonesia di India mengalami fluktuasi yang begitu tajam antara naik maupun turun. Namun hal ini tidak bertahan begitu lama, dampak kenaikan tarif ekspor diikuti kenaikan tarif impor oleh India, sehingga data pasar CPO Indonesia di India mengalami perubahan yang sangat cepat. Selama kurun waktu 2

tahun sejak 2017, India telah meningkatkan tarif bea masuk sebanyak 3 kali hingga mencapai 54% (Badan Pusat Statistik, 2022). Kebijakan peningkatan tarif impor minyak sawit oleh negara importir (India, Uni Eropa, China dan Amerika Serikat) berdampak menurunkan nilai ekspor minyak sawit (Purba et al., 2019). Peningkatan tarif impor adalah meningkatnya harga barang di negara pengimpor sedangkan harga barang pengeksportur akan turun. Kebijakan peningkatan tarif impor bertujuan untuk memancing pihak produsen domestik untuk meningkatkan produksinya dimana akan berdampak pada pendapatan dalam negeri yang meningkat dan kesejahteraan bagi produsen itu sendiri. Sebaliknya pihak importir akan dirugikan karena ketersediaan komoditas yang ada akan berkurang dari segi kualitas maupun kuantitas (Mira & Saptanto, 2017).

Grafik 1.3 Ekspor Minyak Kelapa Sawit Negara Tujuan 2017-2021 (Ton)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Dengan penurunan permintaan sawit dari India, maka hal ini berpotensi akan terjadi kehilangan segmentasi pasar CPO Indonesia di India juga. Selanjutnya juga dapat berpotensi untuk berpengaruh terhadap negosiasi bilateral antar negara yang bersangkutan, sehingga pemerintah seharusnya melakukan negosiasi bilateral yang baik terhadap India untuk mempertahankan pasar CPO secara berkelanjutan. Hal ini menjadi penting, mengingat CPO banyak menyumbang pemasukan negara, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik

di dalam negeri dengan menggunakan pemasukan tersebut sebagai sumberdaya pembangunan dalam negeri. Turunnya permintaan kelapa sawit Indonesia dari India dikarenakan kebijakan pemerintah India yang menetapkan harga dasar baru untuk impor CPO sebesar US\$ 802 per ton, dimana kebijakan tersebut membuat harga impor CPO melonjak (D. Patone et al., 2020).

Indonesia telah mencapai surplus neraca perdagangan dengan India oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu memerhatikan masalah ini lebih serius. Beberapa hal yang bisa dilakukan seperti perjanjian perdagangan bilateral, sehingga isu-isu terkait tarif dapat disepakati secara komprehensif. Langkah yang diambil di India tentu saja ditujukan agar Indonesia segera merevisi pajak ekspor CPO yang relatif lebih tinggi, karena kenaikan pajak ekspor Indonesia tersebut harga CPO di pasar India tidak kompetitif terhadap refined product sehingga tidak ada margin (Post, 2017).

Dari sisi lain, pekebun Malaysia diuntungkan dari pungutan ekspor Indonesia. Mereka mendapatkan pangsa pasar dengan menawarkan minyak kelapa sawit dengan harga diskon dibandingkan pasokan Indonesia, peningkatan pengiriman Malaysia ke India-pun akan dibatasi karena pemangkasan pajak ekspor tersebut. Menteri keuangan, Sri Mulyani juga sempat mengatakan pemerintah akan memangkas tarif untuk pungutan CPO menjadi 175 US\$ per ton dari 255 US\$, tanpa memberikan jangka waktu. Produsen utama Indonesia mengenakan bea dan retribusi sebesar 438 US\$ per ton untuk pengiriman minyak sawit pada bulan Juni. Sebagai perbandingan, bea keluar bulan Juni di Malaysia hampir 90 US\$. Hal tersebut membantu eksportir Malaysia untuk menawarkan minyak sawit dengan diskon besar bahkan setelah mempertahankan margin yang sehat (Jatmiko, 2021). Jika ditinjau lebih dalam, keadaan ini juga justru mengancam pasar ekspor CPO Indonesia terhadap India.

Dalam hal ini, Indonesia sadar dan tidak ingin mengabaikan substansi negatif yang dihasilkan dari perkembangan kelapa sawit. Indonesia mulai mengatur dan menerapkan tata kelola kelapa sawit yang baik dengan berpegang pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan citra yang lebih positif terhadap kelapa sawit Indonesia. Selain itu, adanya desakan konsumen terutama konsumen di pasar-pasar internasional agar kelapa sawit yang masuk ke kawasan tersebut diberikan sertifikasi. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah ada, penulis tertarik untuk membahas terkait upaya mempertahankan pasar ekspor utama minyak sawit Indonesia-India

melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan India Palm Oil Sustainability Framework (IPOS).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, permasalahan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan perdagangan minyak kelapa sawit berkelanjutan kepada India?*”

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari penulisan yang berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang ditulis, sehingga dapat membangun kerangka penelitian yang baik. Teori tersebut juga bisa membantu peneliti dalam menggambarkan suatu fenomena, memecahkan masalah atau memahami topik yang ada. Kerangka pemikiran juga bertujuan memperjelas alur logika penulisan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan diplomasi ekonomi

1. Kerjasama Internasional

Studi tentang kerjasama internasional telah berkembang selama beberapa dekade sebagai landasan atau acuan dalam penelitian hubungan internasional. Konsep kerjasama internasional secara khusus telah digunakan dalam berbagai penelitian tentang hubungan internasional yang memperdebatkan bagaimana kerjasama muncul dan bertahan dalam sistem internasional yang anarkis. Konsep kerjasama internasional sendiri mulai dikenal sejak awal 1980-an sebagai perilaku terkoordinasi dari aktor-aktor independen yang menguntungkan semua pihak (Taylor, 2013).

Secara umum, kerjasama internasional adalah suatu interaksi antar orang atau kelompok yang mewakili berbagai negara dalam mengejar tujuan atau kepentingan bersama. Dalam kutipan jurnal Dawid Walentek, Axelord dan Keohane mengatakan kerjasama dapat bergerak diberbagai bidang seperti kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi. dan, mendefinisikan kerjasama sebagai suatu fenomena yang terjadi ketika aktor menyesuaikan perilaku

mereka dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan melalui proses koordinasi kebijakan (Walentek, 2022)

Dalam tulisannya, Keohanne juga menggambarkan dua elemen penting dari kerjasama internasional (Walentek, 2022), yaitu:

- 1) Perilaku setiap aktor dalam kerjasama internasional diarahkan kepada beberapa tujuan atau keinginan bersama.
- 2) Kerjasama tersebut dipastikan akan memberikan keuntungan kepada masing-masing aktor. Berdasarkan pengertian tersebut, terkait bagaimana kerjasama internasional akan terjadi adalah jika memenuhi setidaknya dua kondisi yang terkait, yaitu a) Para aktor harus memiliki kepentingan bersama dan masing-masing harus mendapatkan keuntungan dari kerjasama mereka. b) Adanya kondisi yang memungkinkan untuk menjalankan kerjasama yang saling membangun dan bersifat substantial.

Berdasarkan gagasan-gagasan di atas, kerjasama antar negara untuk tujuan dan kepentingan bersama, juga dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk diplomasi ideal akan terjalin dengan adanya pembentukan rezim dan kerjasama internasional yang relevan.

Pada dasarnya semua negara di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, terutama untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan pembangunan dalam negerinya. Setiap negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain karena adanya kondisi saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai oleh adanya kerjasama internasional dan perkembangan berbagai aspek yang menjadi objek kerangka yang menjadi tujuan kerjasama antara lain berkaitan dengan masalah perbatasan dan kesejahteraan diantara negara pelaku kerjasama.

Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan suatu masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau

yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (W. Hook, 2011).

Menurut (W. Hook, 2011), kerjasama dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- 2) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- 3) Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- 4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- 5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Selanjutnya, menurut (de Cooker, 2009), hubungan antar negara Barat ditandai oleh *complex interdependence*. Ketika terdapat rasa saling kebergantungan yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi demi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan semi formal untuk menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama (Zartman & Touval, 2010). Sebagai mana pula yang dikemukakan Koesnadi Kartasmita (Kartasmita, 2022), bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Secara ringkas kerjasama internasional dapat dipahami sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan namun di sisi lain juga disahkan secara hukum. Aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang disetujui, regulasi, norma, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana harapannya para aktor dan kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Hal ini juga terjadi pada hubungan antara Indonesia dan India yang menggunakan CPO sebagai perantara perdagangan yang menghubungkan antar dua negara tersebut, sehingga secara tidak langsung kerjasama antar negara terjadi dikarenakan adanya hubungan dagang antara dua otoritas negara yang berbeda.

2. Diplomasi Ekonomi

Penelitian ini juga menggunakan konsep Diplomasi Ekonomi. Diplomasi ekonomi adalah penggunaan hubungan pemerintah dan pengaruh pemerintah untuk meningkatkan perdagangan serta investasi di dunia internasional (Moons & Boer, 2014). Dikatakan Diplomasi Ekonomi karena menggunakan jalan politik untuk memberi pengaruh dalam negosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi kawasan nasional, dan menggunakan cara-cara ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik pada suatu negara (D'Hooghe, 2015).

Untuk mencapai tujuan Diplomasi Ekonomi dalam meningkatkan perdagangan internasional dan investasi, negara harus fokus pada empat aktivitas utama. Keempat aktivitas tersebut terdapat promosi perdagangan, membuat kesepakatan dagang, pembahasan isu perdagangan multilateral, serta promosi penanaman modal asing. Salah satu karakter utama dari diplomasi ekonomi adalah bahwa ekonomi sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan dan perkembangan pasar (Bayne & Woolcock, 2007). Bentuk diplomasi ini adalah jenis diplomasi yang berhadapan langsung dengan kekuatan pasar (*market forces*). Dengan mengadakan pertemuan antara eksportir dan partner dagangnya, akan menjelaskan dan menyusun prioritas serta memperlihatkan aspek-aspek mana yang menguntungkan apabila kegiatan ekspor-impor dilakukan.

Pada era globalisasi saat ini, kerjasama ekonomi merupakan salah satu bidang yang semakin mendapatkan perhatian khusus dalam hubungan kerjasama antarnegara. Perubahan status isu-isu ekonomi yang sudah tidak lagi dianggap sebagai *low politics* membuat diplomasi ekonomi semakin menjadi strategi penting dalam agenda politik internasional. Terdapat beberapa definisi diplomasi ekonomi dimana definisi tersebut terus berubah seiring dengan arah pergerakan ekonomi dan politik internasional. Meskipun demikian, (Bayne & Woolcock, 2007), menggambarkan diplomasi sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara terkait bagaimana negara tersebut

melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain termasuk dimulai dengan bagaimana negara mengambil sebuah keputusan terkait kepentingan ekonominya di tingkat nasional yang kemudian akan dinegosiasikan atau dipromosikan di lingkup global.

Adapun dalam jurnal berjudul *Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies* yang dikarang oleh Maaike, disebutkan ada dua pemetaan diplomasi perdagangan dalam diplomasi ekonomi. Diplomasi perdagangan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan dan ungkapan diplomasi ekonomi digambarkan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan politik (diplomasi) dan transaksi (perdagangan). Diplomasi perdagangan dilakukan oleh suatu negara yang menjalankan kesepakatan dan aturan perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral. Kesepakatan dan aturan-aturan yang ditetapkan, menjadi acuan hukum untuk setiap negara melakukan transaksi perdagangan (Okano-Heijmans, 2011).

Terdapat lima turunan atau yang menjadi *tools* dari diplomasi ekonomi menurut Maaike, tiga diantaranya yaitu:

- 1) Diplomasi komersial, yaitu mencakup promosi perdagangan, investasi, advokasi bisnis, promosi pariwisata, promosi investasi yang bertanggung jawab secara sosial.
- 2) Diplomasi perdagangan, mencakup bilateral (FTA, EPA), multilateral (WTO). Isu-isunya ialah tarif, anti-dumping, ekspor dan impor, lisensi, kuota ekspor dan impor, hambatan perdagangan dan investasi.
- 3) Diplomasi finansial, mencakup kebijakan nilai tukar dan mata uang, penjualan dan pembelian obligasi pemerintah, pembekuan asset, pemotongan iuran atau pembayaran.

Sejalan dengan tujuan umum diplomasi, fungsi utama diplomasi perdagangan internasional adalah berkontribusi terhadap stabilitas dan ketertiban internasional yang mengatur transaksi perdagangan. Ada beberapa hubungan antara diplomasi dan perdagangan, diantaranya: Pembuatan kesepakatan yang terbaru; Pembuatan aturan politik bilateral atau kerangka hukumnya; Pembuatan aturan multilateral; Pertahanan kepentingan perdagangan; Penyelesaian sengketa; dan sanksi ekonomi. Di

Indonesia sendiri, diplomasi ekonomi semakin diperhitungkan dan menjadi perhatian khusus. Di tengah persaingan global yang semakin ketat dengan melihat alat diplomasi ekonomi, pemerintah Indonesia tentu harus memikirkan secara matang arah dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia (Barston, 2014).

Saat ini, sebagian besar pekerjaan diplomatik diprioritaskan salah satunya untuk masalah ekspor dan impor. Perusahaan berusaha menangkap pasar ekspor dan negara-negara berusaha memperdalam kerjasama, baik bilateral maupun multilateral. Salah satunya adalah upaya Indonesia dalam meningkatkan nilai perdagangan internasionalnya di sektor kelapa sawit dengan India.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Indonesia melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam mempertahankan perdagangan minyak sawit kepada India melalui Indian Palm Oil Sustainability Framework (IPOS) secara berkelanjutan. Serta mengetahui bagaimana Indonesia berkontribusi dengan forum internasional untuk menjaga stabilitas perdagangan minyak sawitnya.

E. HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa upaya Indonesia dalam mempertahankan perdagangan minyak sawit kepada India secara berkelanjutan melalui

1. Hubungan bilateral dalam bentuk penerapan kerjasama antara Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan India Palm Oil Sustainability Framework (IPOS) sebagai alat diplomasi ekonomi bilateral antara kedua negara.
2. Hubungan multilateral dalam bentuk kontribusi Indonesia melalui forum-forum internasional.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian dimaksudkan untuk membatasi berjalannya penelitian agar dapat menuju tujuan penelitian secara spesifik dan menghindari bias yang terlalu kompleks dalam penelitian. Rentan waktu dibatasi dari tahun 2017 ketika India menyatakan kenaikan tarif bea masuk CPO bagi Indonesia, hingga 2021 mengenai keberlanjutan dari kerjasama perdagangan Indonesia dan India, serta menggunakan tahun-tahun sebelumnya sebagai data penguat. Dengan begitu peneliti menggunakan rentan waktu tersebut sebagai penanda dinamika kerjasama kedua negara tersebut berjalan.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mencoba untuk menyelidiki dan menjelaskan, serta disaat yang bersamaan juga memberikan informasi-informasi tambahan tentang topik yang diangkat. Dengan penelitian deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan kejadian ataupun fenomena melalui fakta-fakta yang ada mengenai objek penelitian sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang baik dan tepat.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang paling kenal sebagai data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dikonseptualisasikan sebagai cara untuk mempelajari data non-natural yang berasal dari sumber tertulis terkait dengan penelitian (Heaton, 2012). Contoh sumber umum dari data sekunder yaitu meliputi data yang dikumpulkan dari halaman resmi situs web pemerintah, jurnal, buku, sumber yang dipublikasikan, dan pencarian internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan studi pustaka. Studi Pustaka didefinisikan sebagai pemilihan dokumen tersedia yang berkaitan tentang topik, informasi, ide, dan data yang dapat mendukung penelitian yang diusulkan (Hart, 1998). Menurut (Sugiyono, 2009), studi pustaka berhubungan

dengan kajian teoritis dan sumber acuan lain yang berkaitan dengan nilai budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi pustaka juga mengacu pada proses kegiatan yang berkelanjutan, dimulai pada saat pengumpulan sumber dari buku atau artikel pertama yang terkait dengan penelitian dan berlanjut hingga proses penelitian berakhir (Ridley, 2012).

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, basis dari Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah *interactive design model* yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2019).

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini penulis akan membagi menjadi lima bab dengan masing-masing bab menjelaskan sesuai dengan permasalahan di atas.

BAB I merupakan pendahuluan dimana penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan pembahasan dimana penulis menjelaskan mengenai tata kelola komoditas kelapa sawit Indonesia.

BAB III merupakan pembahasan dimana penulis menjelaskan mengenai dinamika kerjasama antara Indonesia dan India dalam transaksi CPO (*Crude Palm Oil*).

BAB IV merupakan pembahasan dimana penulis menjelaskan mengenai upaya Indonesia dalam mempertahankan perdagangan CPO dengan India melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bersama India National Palm Oil Sustainability Framework (IPOS) dan kontribusi Indonesia melalui forum-forum internasional.

BAB V berisikan penutup dan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang sudah dituliskan oleh penulis.